

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



ASPIRASI *kita*

Edisi 16

Monthly Report

Fraksi PKS DPRD JATIM

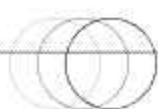
Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

APRIL 2026

   fraksipksjatim
 www.fraksipksjatim.id

Daftar Isi

Sampul Halaman	1
Daftar Isi	2
Profil Singkat Dewan	3
Ringkasan Kinerja Fraksi	4-22
Kiprah Dewan	23-45
Galeri Foto Kegiatan	46-52
Penutup	53





PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

H. AGUS CAHYONO SHI, MHI.

WAKIL KETUA KOMISI A DPRD
JATIM, ANGGOTA FRAKSI PKS

DR. H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM

ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM,
SEKRETARIS FRAKSI PKS

HJ. LILIK HENDARWATI, S.AK

ANGGOTA KOMISI C DPRD JATIM,
KETUA FRAKSI PKS

DRS.H.M. KHUSNUL KHULUK

ANGGOTA KOMISI B DPRD JATIM,
ANGGOTA FRAKSI PKS

HARISANDI SAVARI, S.PT., S.T

ANGGOTA KOMISI D DPRD JATIM,
BENDAHARA FRAKSI PKS

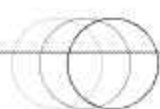
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama April 2026:



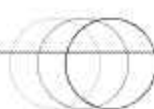
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 6 April 2026

Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
Penyampaian Pendapat Pansus atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 &
Perubahan Alat Kelengkapan DPRD



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama April 2026:

1 Realisasi Pendapatan

- » Realisasi Pendapatan 2025: Rp 29,88 T (104,85% dari target Rp 28,55 T)
- » Pertumbuhan ekonomi 2025: 5,33%
- » Capaian lebih rendah dibanding 2024 (Rp 35,49 T) & 2023 (Rp 33,7 T)
- » Kondisi usaha & investasi 2025 lebih baik
- » Terdapat "anomali" tren pendapatan vs pertumbuhan ekonomi. **Mohon penjelasan**

2 Kinerja PAD

- » Realisasi PAD tinggi: 107,83%
- » Kontribusi PAD: 61,71% (masih moderat untuk kemandirian daerah)
- » Ketergantungan pada pendapatan transfer: 38,18% (masih cukup tinggi)
- » Perlu analisis elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
- » **Evaluasi:** apakah pertumbuhan PAD sejalan/melampaui ekonomi riil?
- » Penting untuk ukur efektivitas intensifikasi & ekstensifikasi pajak. **Mohon penjelasan**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Kamis, 9 April 2026

RAPAT PARIPURNA Pembicaraan Tingkat I
Pemandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025

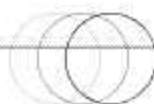
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama April 2026:



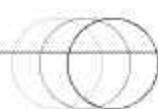
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Kamis, 30 April 2026

RAPAT PARIPURNA Pembicaraan Tingkat II - Laporan/Rekomendasi Pansus
atas Hasil Pembahasan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur
RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I - Penyampaian Nota
Penjelasan Gubernur atas Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan
Kepemudaan dan Keolahragaan



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Recap 6 - 9 April 2026

Agenda Komisi dan Badan

Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 memulai monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Bakorwil III Malang



Komis D memastikan operasional Trans Laut berjalan optimal dalam monitoring dan evaluasi di Pelabuhan Kalianget di Sumenep Wilayah Kerja UPT. Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan sistem perikanan tangkap dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui pertemuan sinergitas di UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu di Tuban.





Komisi E kembali menggelar forum komunikasi terkait implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang upaya perbaikan sistem layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta keselamatan pasien. Untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) terkait penguatan mutu & meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat guna mewujudkan Jawa Timur Sehat, di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada Kediri.



Komisi E mendukung penguatan kinerja BPBD guna peningkatan pelayanan masyarakat melalui peresmian Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPBD Jawa Timur, di Sidoarjo.

Recap 10 - 17 April 2026

Agenda Komisi dan Badan

Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring operational serta meninjau rencana pengembangan bandara Abdul Rachman Saleh tahun 2026



Komisi B meninjau langsung proses produksi ke pabrik Jatiroto untuk memastikan kesiapan sektor industri gula daerah

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan forum komunikatif. Guna melakukan pembahasan kinerja dan rencana program kegiatan bidang kehutanan

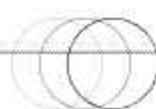




PANSUS LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Menggelar evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, serta capaian kinerja UPT. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur di Malang



**MUSRENBANG RKPD Jawa Timur 2027
Penyampaian Pokir DPRD**



Recap 18 - 24 April 2026

Agenda Komisi dan Badan

Pansus BUMD Jatim bersinergi dengan DITJEN OTDA KEMENDAGRI dan PT. Food Station Tjipinang Jaya. Untuk membahas tata kelola BUMD yang lebih optimal dan profesional



Bamus DPRD Jatim berdiskusi dengan dinas koperasi dan Umkm DIY serta difabel zone. Guna memperkuat kebijakan pemberdayaan disabilitas dan umkm

Pansus LKPJ DPRD Jatim melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPSDM di madiun dan malang. Sebagai bagian pembahasan LKPJ Gubernur 2025

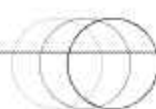




Komisi A DPRD Jatim menerima audiensi singai watch untuk membahas kondisi sungai dan pengelolaan sampah plastik serta mendorong kolaborasi lingkungan



Pansus BUMD DPRD JATIM mengevaluasi kinerja bersama bank jatim, bank UMKM, dan Jamkrida di malang . Guna memperkuat pengawasan BUMD



Recap 24 - 30 April 2026

Agenda Komisi dan Badan

Pansus LKPJ DPRD JATIM berdiskusi dengan kementerian lingkungan hidup atau badan pengendalian lingkungan hidup pada 22-25 april 2026.

Untuk membahas peningkatan kualitas lingkungan hidup serta dampak perubahan metode perhitungan IKLH terhadap pembangunan daerah.



Banggar DPRD JATIM melakukan forum diskusi ke biro pemerintahan setda DKI dan anjungan Jawa Timur TMII di Jakarta. Membahas perencanaan pembangunan dan anggaran, promosi seni budaya, serta kontribusi terhadap PAD.

Pansus LKPJ Gubernur Jatim memantau UPT.Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. WS berantas dan cabang dinas pendidikan di kediri.

Terkait pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 .

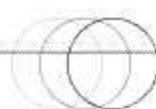




Banggar DPRD JATIM menggelar pertemuan dengan DPRD dan biro pemerintahan SETDA Provinsi Bali di Denpasar. Untuk evaluasi program serta perencanaan pembangunan dan anggaran terkait LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.



Komisi A sidak ke kawasan pandugo Surabaya menindaklanjuti keluhan akses jalan berbahaya mendesak pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim menghentikan ego sektoral penyempitan jalan di lokasi telah menyebabkan kecelakaan fatal dengan 3 korban tewas dan 5 luka-luka



PERERAT SINERGI DENGAN MEDIA, FRAKSI PKS DPRD JATIM KUNJUNGI PRESS ROOM POKJA WARTAWAN INDRAPURA

Upaya memperkuat hubungan dengan insan pers terus dilakukan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Pimpinan dan anggota fraksi melakukan kunjungan ke Press Room Pokja Wartawan Indrapura sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat dengan jurnalis.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, didampingi sejumlah anggota fraksi, yakni Agus Cahyono, Puguh Wiji Pamungkas, Khusnul Khuluk, dan Harisandi Savari. Lilik Hendarwati menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, terlebih masih dalam suasana bulan Syawal, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan media.



“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi di bulan Syawal, sekaligus memperkuat sinergi dengan wartawan,” ujarnya. Menurut Lilik, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat serta kerja-kerja legislatif kepada publik. Tanpa dukungan media, informasi terkait kebijakan dan fungsi pengawasan DPRD tidak akan tersampaikan secara luas.

Ia menegaskan, hubungan yang baik antara DPRD dan media akan berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif. Sementara itu, perwakilan wartawan Pokja Indrapura, Anang Supriyono, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai selama ini anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur dikenal aktif dan komunikatif, baik dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun dalam menjalin hubungan dengan media.

“Anggota PKS di DPRD Jatim tidak hanya kritis, tetapi juga aktif turun ke masyarakat dan menjaga komunikasi dengan media,” ungkapnya. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan insan pers. “Harapan kami, hubungan baik ini bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya,” pungkasnya.



“Tanpa media, suara kita tidak akan terdengar di masyarakat. Maka dari itu, sangat penting membangun sinergi dengan wartawan,” tambahnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



HOME

Catatan

Fraksi PKS DPRD Jatim Silaturahmi ke Pokja Wartawan Indrapura, Perkuat Sinergi dengan Media

Written by Sabda News | April 14, 2024



PERKAWAJIAN

Perkuat Sinergi, Fraksi PKS DPRD Jatim Sambangi Pressroom Pokja Wartawan Indrapura

Penulis: Kurniawan Chandra News - Editor: Sri Kurnia Mahroni

24 Apr 2024 20:51



Ketunggalan Fraksi PKS (DPRD) Jatim ke Pressroom Pokja Wartawan Indrapura.

JATIMTIMES – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Prosesor Pokja Wartawan Indrapura pada Senin (6/4/2025), saat jajaran pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) hadir berkunjung.



Waktu: 14 Mei 2025

Malang Raya | Jawa Timur | Nasional | Internasional | Ekonomi & Bisnis | Edukasi | Link and Match | Kampus | Lainnya

Jawa Timur

Fraksi PKS DPRD Jatim Sambangi Wartawan Indrapura, Bahas Peran Strategis Media

by About Malang | About Malang | April 9, 2024 | 16:14 WIB



Terpopuler

1. Inip Strategi Direktur Poltekam Ekspor Talenta Mahasiswa Soreng Industri...
2. Homeless Media Mulai Marak, Fokus Media UM Ingatkan Media Arustoma...
3. Dari Kementerian ke Ruang Kelas, Dosen Poltekam Ini Bawa 'Orkestrasi' Pemasaran...
4. Gerak Cepat Implementasi PES, Poltekam dan Kreski Media Group Gaspol...
5. Urut Tren Pelari Kalbar dan Wisata Mampirin, Poltekam Slop Gagah Konsep...

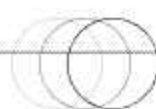
FPKS INGATKAN EVALUASI LKPJ HARUS LEBIH SUBSTANTIF, BUKAN SEKADAR STATISTIK



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 tidak boleh berhenti pada deretan angka dan statistik semata. Evaluasi harus mampu menggambarkan dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Juru bicara FPKS, R. Harisandi Savari, menyampaikan bahwa meskipun capaian makro yang ditampilkan dalam LKPJ terlihat cukup impresif, namun pendekatan yang terlalu dominan pada data statistik justru berpotensi mengaburkan persoalan riil di lapangan. "Evaluasi LKPJ harus lebih substantif. Jangan hanya berhenti pada angka-angka agregat, tetapi harus mampu menjelaskan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).

FPKS tetap memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 yang berhasil meraih 133 penghargaan di berbagai sektor. Namun, capaian tersebut dinilai harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam catatannya, FPKS menyoroti persoalan serius terkait indikator kinerja daerah. Dari total 166 indikator, sebanyak 13 indikator tidak tercapai, sementara 67 indikator lainnya bahkan tidak dapat diukur karena ketiadaan data.





“Jangan sampai kita terjebak pada pertumbuhan tinggi, tetapi tidak diikuti pemerataan. Ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial”.

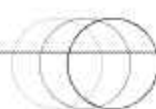
“Ini menjadi alarm penting. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi yang tepat jika data yang disajikan tidak lengkap?” tegasnya. Selain itu, FPKS juga menyoroti adanya kecenderungan penyajian LKPJ yang lebih menitikberatkan pada capaian makro seperti pertumbuhan ekonomi, tanpa mengulas secara mendalam kualitas pertumbuhan tersebut.

Menurut Harisandi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen memang patut diapresiasi. Namun, perlu dilihat lebih jauh apakah pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif dan mampu memperkuat sektor ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, dan nelayan.

FPKS juga menyoroti aspek pengelolaan anggaran dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih belum optimal. Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dan belum menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional juga menjadi perhatian. FPKS mendorong agar anggaran lebih diarahkan pada belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, FPKS turut mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026. Pemerintah diminta segera memetakan wilayah rawan dan menyiapkan langkah antisipatif agar tidak berdampak pada produksi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menutup pandangannya, FPKS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Kami berharap LKPJ ini benar-benar menjadi instrumen evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan ke depan,” pungkas Harisandi.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



HARI BURUH 2026, KETUA FPKS JATIM: KEADILAN TRANSISI DIGITAL HARUS LINDUNGI HAK PEKERJA

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi para pekerja di tengah derasnya arus transformasi digital. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa perubahan teknologi tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja.

Menurut Lilik, Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat atas perjuangan panjang kaum pekerja dalam meraih kesejahteraan dan perlindungan yang layak. “Di tahun 2026 ini, kita dihadapkan pada tantangan baru berupa percepatan transformasi digital yang membawa peluang sekaligus risiko, terutama bagi pekerja sektor informal dan masyarakat kecil,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Ia menekankan pentingnya keadilan dalam transisi digital, agar seluruh pekerja, baik di sektor formal, informal, maupun ekonomi platform, tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti upah layak, jaminan sosial, perlindungan kerja, serta kepastian hukum.

“Transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun. Keadilan harus memastikan semua pekerja tetap terlindungi”.

Lilik menyebut negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan regulasi yang adaptif dan berpihak pada pekerja, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam ekonomi digital dan gig economy. Selain itu, ia juga mendorong penguatan sistem perlindungan sosial agar pekerja, khususnya di sektor informal, tidak semakin rentan akibat perubahan pola kerja. "Pekerja kecil harus dilindungi.

Jangan sampai mereka justru menjadi korban dari perubahan sistem kerja yang semakin digital," katanya. Tak hanya itu, Lilik juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan literasi digital bagi masyarakat, sehingga pekerja tidak hanya menjadi objek, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku utama dalam ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja harus tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan pembangunan. "Tidak boleh ada pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan martabat dan hak pekerja, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah," ujarnya.

Lilik juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersinergi menciptakan ekosistem kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. "Hari Buruh adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa ditopang oleh keringat para pekerja. Sudah saatnya keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja tanpa batas," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Ancaman kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026 mulai mendapat sorotan serius. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta tidak hanya bersiap secara jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Maret hingga April merupakan masa pancaroba.

Sementara itu, pada Mei sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur mulai memasuki musim kemarau, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026 yang mencakup 70,9 persen wilayah. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di ratusan desa, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber air.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa potensi tersebut harus segera direspons melalui langkah mitigasi yang terencana dan terukur. "Ini harus dijadikan penyikapan dalam arah kebijakan ke depan, terutama terkait potensi El Nino yang bisa memperparah kekeringan," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.

Berdasarkan data dari BPBD Jawa Timur, terdapat sekitar 800 desa yang berpotensi mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Angka tersebut cenderung berulang setiap tahun, menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani secara tuntas. Menurut Puguh, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi jangka panjang. "Sudah saatnya disiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap kali musim kemarau datang," tegasnya.



Ancaman Kekeringan Mengintai Jatim, Puguh DPRD Jatim Dorong Solusi Permanen: Sumur Artesis hingga Pipanisasi Air



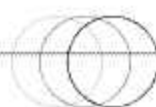
Puguh mengusulkan sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya pembangunan sumur bawah tanah atau sumur artesis di wilayah rawan kekeringan. Meski membutuhkan anggaran besar, ia menilai langkah tersebut menjadi investasi penting untuk menjamin ketersediaan air bersih.

Selain itu, penguatan infrastruktur pipanisasi air juga dinilai menjadi solusi efektif, terutama di daerah yang memiliki sumber mata air namun belum terdistribusi dengan baik. "Perlu dibuat tandon besar dan jaringan distribusi air, sehingga saat kemarau masyarakat tidak lagi berebut air atau menghadapi lonjakan harga air bersih," jelasnya.

Tak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, potensi kekeringan juga menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. Padahal, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Puguh mengingatkan bahwa mitigasi di sektor pertanian harus menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan pangan, terlebih di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas instansi di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang secara komprehensif. "Semua pihak harus memberi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial di masyarakat," tandasnya.

Dengan langkah mitigasi yang tepat dan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan Jawa Timur tidak lagi menghadapi "drama tahunan" kekeringan yang selama ini kerap meresahkan masyarakat.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

Atasi Kekeringan, Anggota DPRD Jatim Usulkan Sumur Artesis Permanen

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, mengusulkan pembangunan sumur artesis permanen untuk mengatasi kekeringan yang melanda sebagian wilayah Jawa Timur.

Potensi Kemarau Panjang Hingga Kekeringan, DPRD Jatim Minta Pemprov Gencarkan Mitigasi

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk gencarkan upaya mitigasi kekeringan mengingat potensi kemarau panjang yang akan melanda Jawa Timur.

Kekeringan Ancam 800 Desa Setiap Tahun, DPRD Jatim Desak Solusi

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekeringan yang melanda ratusan desa di Jawa Timur.

Ada 800 Desa di Jatim Terancam Kekeringan, DPRD Jatim Desak Pemprov Bangun Sumur Artesis Permanen

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera membangun sumur artesis permanen untuk mengatasi kekeringan yang melanda ratusan desa di Jawa Timur.

DPRD Jatim Desak Pemprov Siapkan Solusi Permanen Atasi Kekeringan Jawa Timur

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang melanda Jawa Timur.

Ancaman Kemarau Panjang 2026 di Jatim, DPRD Jatim Dorong Solusi Permanen Atasi Krisis Air

Anggota DPRD Jawa Timur, Ruziq Wajid Parungklas, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi krisis air mengingat ancaman kemarau panjang di Jawa Timur pada tahun 2026.



BUMD JATIM DISOROT HABIS-HABISAN: GAJI JUMBO, KINERJA MINIM, PENGAWASAN TUMPUL

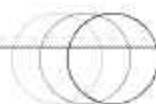
Lingkar.net - Sorotan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur kian tajam. Tak hanya soal gaji direksi dan komisaris yang dinilai tak sebanding dengan kinerja, DPRD Jatim juga mengungkap lemahnya fungsi pengawasan, bahkan cenderung tumpul. Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, secara blak-blakan menilai peran komisaris di sejumlah BUMD belum berjalan optimal. Padahal, posisi tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi. "Harusnya komisaris itu melakukan evaluasi. Tapi yang kami lihat di Jawa Timur, fungsi itu belum berjalan maksimal," tegasnya, Kamis (30/4/2026).

Ia membandingkan dengan praktik di Yogyakarta, yang justru menunjukkan pola pengawasan lebih tegas. Dalam studi banding yang dilakukan Pansus, ditemukan bahwa badan pengelola di sana aktif mengevaluasi kinerja BUMD melalui komisaris. "Di Jogja, pengawasan itu hidup. Komisaris benar-benar dipaksa menjalankan fungsi evaluasi. Di Jatim, ini yang belum terlihat," ujarnya.

Biro Perekonomian Disorot

Tak hanya komisaris, Lilik juga menyoroti lemahnya peran Biro Perekonomian Pemprov Jatim yang dinilai belum mampu menjadi "dirijen" bagi orkestrasi BUMD. Menurutnya, minimnya pengawasan dan koordinasi membuat BUMD gagal tampil sebagai motor penggerak ekonomi daerah. "Harusnya Biro Perekonomian menjadi pengarah. Tapi faktanya, fungsi itu belum kuat. Akibatnya, kita tidak melihat BUMD tumbuh sebagai core ekonomi bisnis di Jawa Timur," ungkap Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS ini.

Ia mengungkapkan, Pemprov Jatim sebenarnya tengah menggodok pembentukan badan khusus pengelola BUMD dan aset. Namun, rencana tersebut dinilai membutuhkan waktu panjang karena harus melalui perubahan regulasi. "Kalau menunggu badan itu terbentuk, terlalu lama. Sementara kita butuh perbaikan kinerja sekarang," katanya. Sebagai solusi cepat, Pansus mendorong pembentukan biro khusus yang fokus menangani BUMD, tanpa harus menunggu pembentukan badan baru yang berpotensi memakan waktu dan restrukturisasi kelembagaan.



Gaji Dibuka, Publik Menilai

Di sisi lain, polemik gaji direksi dan komisaris BUMD juga kini terbuka ke publik. Lilik menegaskan, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membuka data tersebut. "Sekarang publik bisa melihat sendiri. Bagaimana respons gubernur, itu kami serahkan," ujarnya. Ia menambahkan, kewenangan DPRD terbatas pada aspek penyertaan modal. Sementara pengelolaan dan evaluasi kinerja berada di tangan eksekutif.

Sebelumnya, hal ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (30/4/2026), saat laporan Pansus dibacakan oleh juru bicara Abdullah Abu Bakar. "Pansus menemukan adanya ketidakseimbangan antara tingkat remunerasi dengan kinerja yang dihasilkan," tegasnya. Ia mengungkapkan, dalam beberapa kasus, jajaran direksi dan komisaris tetap menerima gaji tinggi lengkap dengan fasilitas, meski performa perusahaan tidak menunjukkan hasil yang setara.

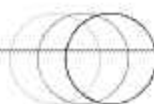
Data yang dipaparkan Pansus menunjukkan variasi gaji yang cukup mencolok di berbagai BUMD Jatim pada 2026. Di PT Bank Jatim Tbk, misalnya, Direktur Utama menerima sekitar Rp160 juta per bulan, disusul Direktur Rp128 juta. Sementara Komisaris Utama dan Komisaris masing-masing memperoleh Rp88 juta dan Rp79,2 juta. Di PT Panca Wira Usaha Jatim, Direktur Utama digaji Rp100,6 juta, Direktur Rp77,7 juta, sementara Komisaris Utama Rp28,4 juta dan Komisaris Rp22,7 juta.

Sementara itu, di PT Petrogas Jatim Utama, Direktur Utama menerima Rp71,2 juta dan Komisaris Utama Rp60 juta per bulan. Besaran gaji juga terlihat di PT Jamkrida Jatim, dengan Direktur Utama Rp68,1 juta dan Komisaris Utama Rp31,7 juta. Adapun di PT Jatim Grha Utama, Direktur Utama memperoleh Rp54,4 juta. Untuk BUMD lainnya seperti PT BPR Jatim dan PT Air Bersih Jatim, gaji Direktur Utama berada di kisaran Rp49,5 juta hingga Rp37,9 juta per bulan.

Ketergantungan Tinggi pada Sektor Perbankan

Tak hanya soal gaji, Pansus juga menyoroti minimnya kontribusi sebagian besar BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari total setoran dividen sekitar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen disebut berasal dari Bank Jatim. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. "Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi, melainkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan," jelasnya.

Editor: Setiadi



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

JATIM POS .CO
JATIM POS ONLINE

Delta di Madun yang Sangat Hilang
Diamukan Menunggu di S...

OPD DAN BUMD
Delta di Madun yang Sangat Hilang
Diamukan Menunggu di S...

Lilik DPRD Jatim Ingatkan OPD dan BUMD Tetap Jaga Kinerja di Tengah WFH

21 April 2020

Foto: Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) ASN Pemprov Jatim tidak boleh menjadi alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menurunkan

TERKINI

Bupati Jember Pasang Bata di Sukan Caji, Pasangkan Gunung

JATIMTIMES

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: Efisiensi Energi Bukan Dalih OPD dan BUMD Kendurkan Kinerja

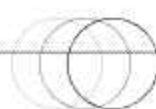
Penulis: Subhaned Cholul Anwar | Editor: Sri Kusni Marlina

21 April 2020

Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati.

JATIMTIMES — Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati, inewanti-wanti agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu tidak dijadikan alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menurunkan produktivitas.

Lilik menegaskan, langkah efisiensi energi di tengah krisis global adalah keharusan, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan target kinerja, khususnya bagi BUMD yang saat ini tengah jadi sorotan publik.



Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya yang memiliki prestasi dan potensi akademik.

Menurutnya, jalur afirmasi dalam SPMB harus dimaksimalkan agar benar-benar memberikan akses pendidikan yang adil bagi siswa dari kelompok ekonomi terbawah. "Anak-anak dari keluarga desil 1 sampai desil 4 yang memiliki prestasi harus diprioritaskan. Mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas," ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim ini.

Puguh mengungkapkan, jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Timur pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 618 ribu siswa. Namun, daya tampung SMA dan SMK negeri yang dikelola Pemprov Jatim hanya sekitar 39 persen. "Kondisi ini membuat sekitar 60 persen lulusan tidak tertampung di sekolah negeri. Akibatnya, persaingan menjadi sangat ketat," jelasnya.

Ia menilai, berbagai skema dalam SPMB seperti jalur domisili, prestasi, afirmasi, hingga skema khusus seperti golden ticket sudah cukup variatif. Namun, tanpa sosialisasi yang masif dan sistem yang kuat, potensi masalah di lapangan tetap besar. "Durasi pendaftaran yang singkat dan jeda antar tahap yang terbatas membuat masyarakat harus benar-benar memahami mekanismenya. Ini yang perlu diantisipasi sejak awal," katanya.

Selain itu, Puguh juga mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk memperkuat sistem digital serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan transparan. Ia menegaskan, proses SPMB harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang membutuhkan. "SPMB ini harus fair dan berkualitas. Jangan sampai anak-anak yang punya potensi justru terhambat hanya karena keterbatasan ekonomi," tegasnya.

Lebih jauh, Puguh mengingatkan bahwa SPMB merupakan pintu awal dalam membentuk kualitas generasi muda Jawa Timur. Karena itu, selain proses seleksi yang adil, peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh juga harus menjadi prioritas. "Kita ingin pendidikan di Jawa Timur terus meningkat kualitasnya, melahirkan generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki daya saing nasional hingga global," pungkasnya.



**SPMB 2026, PUGUH
DPRD JATIM MINTA
SISWA BERPRESTASI
DARI KELUARGA
MISKIN HARUS
DIPRIORITASKAN**



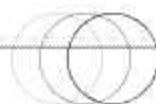
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Madura, R. Harisandi Savari, menegaskan pentingnya percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura oleh pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan KEK Tembakau bukan sekadar proyek ekonomi biasa, melainkan langkah strategis untuk mengangkat komoditas unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Madura.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Ibu Gubernur yang serius mengawal KEK Tembakau Madura sampai ke pemerintah pusat. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap petani dan ekonomi lokal Madura,” ujar legislator PKS ini. Harisandi menilai selama ini potensi tembakau Madura belum dikelola secara optimal dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi.

Padahal, komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar jika dikelola dari hulu hingga hilir secara sistematis. Dengan adanya KEK, ia berharap rantai nilai tembakau dapat diperkuat, mulai dari sektor budidaya, pengolahan, distribusi, hingga ekspor. “KEK Tembakau akan menjadi game changer. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menarik investasi ke Madura,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak berlarut-larut dalam proses penetapan KEK Tembakau Madura. Menurutnya, percepatan pembangunan di kawasan Madura sudah sangat mendesak. “Kami mendorong pemerintah pusat segera mengambil keputusan. Jangan sampai potensi besar ini tertunda hanya karena proses administratif yang berlarut,” katanya.

Harisandi menegaskan DPRD Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh agar KEK Tembakau Madura dapat segera terealisasi. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan kebijakan daerah, fungsi pengawasan, serta sinergi lintas sektor. “Ini momentum penting. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Jatim dan komitmen kuat Gubernur, kami optimistis KEK Tembakau Madura bisa segera terealisasi dan menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan kepulauan,” pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Klikwarta.com, Surabaya - Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti serius keberadaan perlintasan sebidang kereta api yang dinilai tidak produktif dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Hal ini mengemuka pasca kecelakaan di Bekasi yang kembali menjadi pengingat lemahnya pengamanan di sejumlah titik perlintasan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, R. Harisandi Savari, menegaskan bahwa di wilayah Jawa Timur masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjagaan memadai, bahkan berada di lokasi dengan tingkat aktivitas rendah. "Peristiwa di Bekasi harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Di Jawa Timur, masih banyak perlintasan sebidang yang tidak produktif, minim pengawasan, dan justru menjadi titik rawan kecelakaan. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya pada Kamis (30/4/2026).

Komisi D, lanjutnya, mendorong pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan, termasuk PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota, untuk segera melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang. Menurutnya, perlintasan yang tidak lagi memiliki urgensi tinggi atau volume lalu lintas signifikan sebaiknya ditutup demi keselamatan masyarakat.

"Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jika ada perlintasan yang secara fungsi sudah tidak produktif, maka opsi penutupan harus berani diambil. Jangan menunggu korban berikutnya," tegasnya. Selain penutupan, Komisi D juga mendorong percepatan pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass di titik-titik strategis dengan mobilitas tinggi.

Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kelancaran lalu lintas di kawasan padat. Komisi D DPRD Jatim juga meminta adanya sinergi lintas sektor agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari perencanaan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. "Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal nyawa manusia. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan berpihak pada keselamatan," pungkasnya.



Komisi D DPRD Jatim Dorong Penutupan Perlintasan Sebidang Tak Produktif Pasca Kecelakaan Bekasi

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



UPDATE

Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden

SULAWESI SELATAN - KAMIS, 14 MEI 2026

Komisi D DPRD Jatim Dorong Penutupan Perlintasan Sebidang Tak Produktif Pasca Kecelakaan Bekasi

Kamis, 30/04/2026 - 17:28



TODAY

Pavingisasi Program TMMD Ke-Bikin Masyarakat Ceria, Lingkup Jadi...

JAWA TIMUR - KAMIS, 14 MEI 2026

Masyarakat Desa Brabe Dukung Pelatihan Pengelolaan Sampah Pembuatan...

JAWA TIMUR - KAMIS, 14 MEI 2026

Pengerjaan Tandon Air Program TMMD Ke 128 Tinggal Finishing

JAWA TIMUR - KAMIS, 14 MEI 2026

TMMD Membentuk Kebersamaan dan Masyarakat

JAWA TIMUR - KAMIS, 14 MEI 2026

Satgas TMMD Ke-128 Kodim 0820/Probolinggo Uji Fungsi Sa

JAWA TIMUR - KAMIS, 14 MEI 2026

FEATURED VIDEO

Dugaan penipuan berkedok pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali terjadi, kali ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kasus yang melibatkan penggunaan surat keputusan (SK) palsu tersebut menuai sorotan dari DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, yang akrab disapa Agus Cah, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.

“Penipuan ASN dengan SK palsu ini dampaknya sangat besar. Banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi ada indikasi pelaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Ini harus ditindak tegas dan dihukum berat,” tegas legislator PKS itu. Menurutnya, selain penegakan hukum, langkah penting lainnya adalah memastikan para korban mendapatkan kembali haknya. Ia meminta aparat turut mengawal proses pengembalian uang yang telah disetorkan korban kepada pelaku.

“Pelaku wajib mengembalikan uang korban. Ini penting agar kerugian masyarakat bisa diminimalkan,” ujarnya. Agus juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah kasus serupa terulang. Ia mendorong adanya transparansi informasi terkait rekrutmen aparatur sipil negara, mulai dari rencana formasi hingga pengumuman resmi pembukaan atau ketiadaan seleksi CPNS dalam satu tahun anggaran.

“Kalau memang tidak ada rekrutmen, harus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Ini untuk menghindari munculnya informasi liar yang menyesatkan masyarakat,” jelasnya. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang menjanjikan kelulusan CPNS dengan imbalan tertentu. Agus menegaskan bahwa proses menjadi ASN harus ditempuh melalui mekanisme resmi dan transparan.

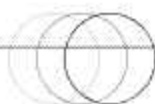
“Jangan tergiur jalan pintas. Kalau ada informasi lowongan CPNS, pastikan cek ke sumber resmi pemerintah. Masyarakat harus lebih cerdas dan tidak mudah percaya,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat dapat melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait, termasuk memanfaatkan informasi dari wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan kebenaran informasi.

Agus berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar ke depan tidak ada lagi korban penipuan dengan modus serupa. “Kami minta aparat penegak hukum benar-benar mengusut tuntas dan menangkap pelaku. Jangan sampai kejadian ini terulang merugikan masyarakat,” pungkasnya.



**PENIPUAN BERKEDOK
CPNS KEMBALI
TERJADI, AGUS CAH
DPRD JATIM DESAK
PENINDAKAN TEGAS**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar simulasi tsunami di wilayah pesisir selatan, tepatnya di Trenggalek dan Lumajang, sebagai bagian dari uji kesiapsiagaan menghadapi potensi megathrust. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono.

Agus, yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, menilai langkah BPBD tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana. "Sebagaimana pernah disampaikan BMKG, jalur pantai selatan Jawa memang memiliki potensi sebagai sumber bencana, termasuk tsunami.

Maka saya mengapresiasi OPD yang turun langsung ke masyarakat sebagai bentuk edukasi kesiapsiagaan," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu. Namun demikian, Agus mengingatkan agar program edukasi kebencanaan dilakukan dengan pendekatan yang tepat, sehingga tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. "Harapan saya, program kesiapsiagaan ini tidak menjadi hal yang menakutkan. Jangan sampai informasi potensi bencana justru menghantui masyarakat pesisir selatan," tegasnya.

Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tanda-tanda alam dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan saat terjadi kondisi darurat. "Yang penting masyarakat diedukasi untuk membaca gejala alam, memahami tanda-tanda bencana, dan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi situasi darurat," jelasnya. Agus juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dalam proses edukasi agar informasi yang disampaikan lebih efektif dan mudah diterima oleh warga.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar isu potensi bencana tidak terlalu sering diekspos secara berlebihan, mengingat kawasan pantai selatan juga merupakan destinasi wisata unggulan yang menopang perekonomian daerah. "Pantai selatan ini juga destinasi wisata yang menarik. Kalau terlalu sering dikaitkan dengan potensi bencana, bisa berdampak pada menurunnya minat wisatawan," katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini wilayah seperti Trenggalek belum pernah mengalami bencana tsunami, dan diharapkan kondisi tersebut tetap terjaga ke depannya. "Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terjadi tsunami di sana. Harapan kita tentu tidak akan terjadi, namun tetap harus siap dengan edukasi yang baik," pungkasnya. Agus berharap upaya mitigasi bencana di Jawa Timur dapat terus ditingkatkan dengan pendekatan yang bijak, sehingga masyarakat tetap waspada tanpa merasa terancam, serta tidak mengganggu sektor ekonomi seperti pariwisata.

SIMULASI TSUNAMI DI SELATAN JATIM, AGUS CAH DPRD JATIM: EDUKASI PENTING, JANGAN TIMBULKAN KETAKUTAN



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

PERISTIAHA | EKONOMI & MIGRA | KERUKUNAN | HUKUM & KRIMINAL | PENDIDIKAN & KEMAHAN | SPORTS & RECREATION | MISKIN & BERHA

Home > Masyarakat > DPRD Jatim Dukung Simulasi Tsunami, Soroti Pentingnya Edukasi Seimbang

DPRD Jatim Dukung Simulasi Tsunami, Soroti Pentingnya Edukasi Seimbang

Mohajawab.com Selasa, 20 April 2026 08:08



Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono / langkah yang sangat baik sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana (Foto: Istimewa)

Berita Terkini

Long W Partner

Indah Merli

Temukan

Berita la

Berita keki

Hasil 2024

Calon Dibek Torja

Waga

ANTARAJATIM

HOME | NASIONAL | KHABAR JATIM | LINTAS DAERAH | BERITA

Legislator Jatim: Simulasi tsunami langkah kesiapsiagaan bencana

Selasa, 20 April 2026 8:07 WIB



Wakil ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono saat menghadiri rapat koordinasi di Surabaya. (Berita: wptv; foto: ANTARAJATIM/DPRD Jawa Timur)

Mitigasi Bencana Selatan Jatim, DPRD Ingatkan Edukasi Jangan Timbulkan Ketakutan

Redaksi Wptv.com April 20, 2026 (24/04/26)



f X t w

BERANDA | BERITA | NASIONAL | KRIMINAL | POLITIK | PENDIDIKAN | KESEHATAN | BISNIS | TEKNOLOGI | OLIMPIA

ISLAMIC CORNER | NTB

SURABAYA | Aceh | Madura | Selat DRZ Jakarta | Papua | Sumut | NTB | Sunda | Jateng | Sulang | SUL

Simulasi Tsunami di Selatan Jatim, Agus Cahyono Tegaskan Edukasi Penting, Jangan Timbulkan Ketakutan

Redaksi Wptv.com April 20, 2026 08:08 WIB



Temukan lebih banyak

KANAL

Hawa

Berita

Hankam

Hibur

Kesehatan

Olahraga

Pendidikan

Teknologi

KANAL KOTA

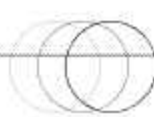
Bancong

Matang

Prabalingga

Sidoarjo

Situbone



HARGA PLASTIK MELONJAK HINGGA 60 PERSEN, KHUSNUL DPRD JATIM MINTA PEMERINTAH LAKUKAN MITIGASI



Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini mulai dikeluhkan pelaku usaha, terutama di pasar tradisional. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menilai lonjakan harga tersebut cukup signifikan dan perlu segera diantisipasi oleh pemerintah.

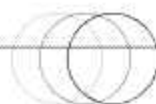
Menurut Khusnul, sebagai pihak yang dekat dengan aktivitas pasar, ia merasakan langsung dampak kenaikan harga plastik yang kini mencapai 30 hingga 60 persen. "Saya kebetulan orang pasar, jadi sangat terasa kenaikan harga plastik ini. Kalau saya amati, kenaikannya antara 30 sampai 60 persen," ujar legislator PKS itu. Kenaikan harga ini dinilai berpotensi membebani para pedagang, khususnya pelaku usaha kecil yang masih sangat bergantung pada plastik sebagai kemasan utama.

Khusnul meminta pemerintah melalui dinas terkait, khususnya bidang perindustrian dan perdagangan, untuk segera melakukan langkah mitigasi agar harga tidak terus melonjak. "Saya berharap dinas terkait bisa melakukan mitigasi agar harga plastik ini tidak terus naik. Kalau tidak ada terobosan, kasihan pelaku usaha yang masih sangat bergantung pada plastik," katanya. Di sisi lain, Khusnul juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang, salah satunya dengan memperkuat industri daur ulang plastik di dalam negeri.

Menurutnya, langkah ini dapat menekan biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. "Salah satu solusi yang rasional adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong daur ulang plastik menjadi bahan baku kembali dengan biaya yang lebih murah," jelasnya. Khusnul mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diduga dipengaruhi oleh faktor global, terutama karena bahan baku plastik masih bergantung pada impor dari luar negeri.

Ia menyebut adanya dinamika geopolitik internasional juga turut berdampak terhadap kenaikan harga bahan baku tersebut. "Informasi sementara, bahan bakunya ini banyak impor, dan ada pengaruh dari kondisi global. Tapi kita ingin tahu lebih dalam, khususnya dampaknya di Jawa Timur seperti apa," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Jawa Timur berencana memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam. Khusnul menegaskan pihaknya akan mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah agar kenaikan harga plastik tidak semakin memberatkan masyarakat. "InsyaAllah akan kami bahas di komisi, termasuk mencari solusi agar persoalan ini bisa segera ditangani," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pertanian menjadi sektor yang berpotensi terimbas di tengah ancaman kekeringan seiring potensi kemarau panjang sebagaimana diprediksi oleh BMKG. DPRD Jatim pun mendorong Pemprov melakukan mitigasi di samping juga menyiapkan solusi jangka panjang.

Mitigasi ini didorong oleh anggota Komisi B DPRD Jatim, Khusnul Khuluk. Sebagai informasi, BMKG beberapa waktu lalu telah memprediksi bahwa kemarau berpotensi terjadi hingga Agustus 2026 mendatang. Prakiraan cuaca ini, diharapkan bisa membuat Pemprov semakin mengencangkan mitigasi. "Mitigasinya harus benar-benar ditingkatkan," kata politisi PKS ini ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (9/4/2026).

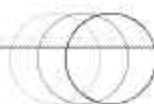
Khusnul mendorong mitigasi ini dengan tujuan agar masyarakat tidak dipusingkan begitu kemarau tiba. Apalagi, diprediksi puncak kemarau masih akan terjadi pada Agustus. Mitigasi ini juga sangat diperlukan untuk sektor pertanian. Mengutip pengumuman BMKG sebelumnya, hal yang perlu diwaspadai memang salah satunya sektor pertanian.

Dari itu, BMKG Juanda menyarankan adaptasi sektor pertanian. Yakni melalui penggunaan varietas padi umur pendek tahan kering atau beralih ke tanaman palawija. Khusnul menegaskan bahwa dalam kondisi kemarau hingga potensi kekeringan, petani tentu saja berharap intervensi dari pemerintah. "Sehingga memang mitigasi harus diatur sebaik mungkin termasuk penganggarannya," jelas Khusnul.



ANTISIPASI KEMARAU PANJANG, PEMPROV JATIM PERLU SIAPKAN MITIGASI ANTISIPASI KEKERINGAN

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





Galeri Foto Kegiatan



4 April -
Halal Bihalal Pengurus LSA



4 April -
TAMU RW 2 KALIKEDINDING



9 April - Dialog Jawa Pos TV



9 April - Kunjungan tamu dari KAMMI
Jatim



18 April - ELHA Edu



21-23 April - Bimtekda Anggota Dewan PKS se-Jatim



25 April - Senam lansia bu Jidan



26 April - Rakercab DPC Gunung Anyar



26 April - Rakercab DPC Sukolilo



26 April - Sosialisasi Dewan



Galeri Foto Kegiatan



Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai agama sebagai benteng moral dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan digitalisasi modern.

Aula Rumah Sakit Wajak Husada, Jl. Raya Kidangbang, No.02, RT.016/RW.005, Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
Sabtu, 18 April 2026
Masyarakat umum dan tokoh masyarakat



Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat untuk memperkuat nilai spiritual dan sosial dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat di era digital.

Gedung Aula SDIT Robbani, Jl. Watu Gede, Dusun Krajan, Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
Minggu, 19 April 2026
Masyarakat umum dan tokoh masyarakat



Galeri Foto Kegiatan



Menguatkan pemahaman peserta mengenai peran agama sebagai landasan pembentukan karakter, etika sosial, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi perubahan zaman.

Mirabell Hotel & Convention Hall, Jl. Panglima Sudirman No.39A, Lemah Duwur, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang
Senin, 27 April 2026
Masyarakat umum dan tokoh masyarakat Kabupaten Malang



Terwujudnya penguatan wawasan masyarakat terkait pentingnya implementasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai filter terhadap dampak negatif globalisasi dan digitalisasi.

Aula Rumah Sakit Wajak Husada, Jl. Raya Kidangbang, No.02, RT.016/RW.005, Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
Selasa, 28 April 2026
Masyarakat umum dan tokoh masyarakat Kecamatan



Galeri Foto Kegiatan



Peran Masyarakat dalam meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam berkelanjutan, Pengajian rutin, Sowan

Trenggalek
25 April 2026
Konstituen



Halal Bi Halal & Jaulah DPW, SOWAN

Trenggalek
9 & 24 April 2026
kader, kosntituen



Galeri Foto Kegiatan



Sosialisasi kunci bertahan produktif tengah tekanan zaman serba cepat

18 April 2026
konstituen



Kegiatan turba atau biasa di sebut kundapil untuk menyapa dan mendengarkann aspirasi dari masyarakat yg ada di dapil.

Yayasan Sholihuddin
15 Maret 2026
15 Orang

FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



PKS



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim